

BAB I

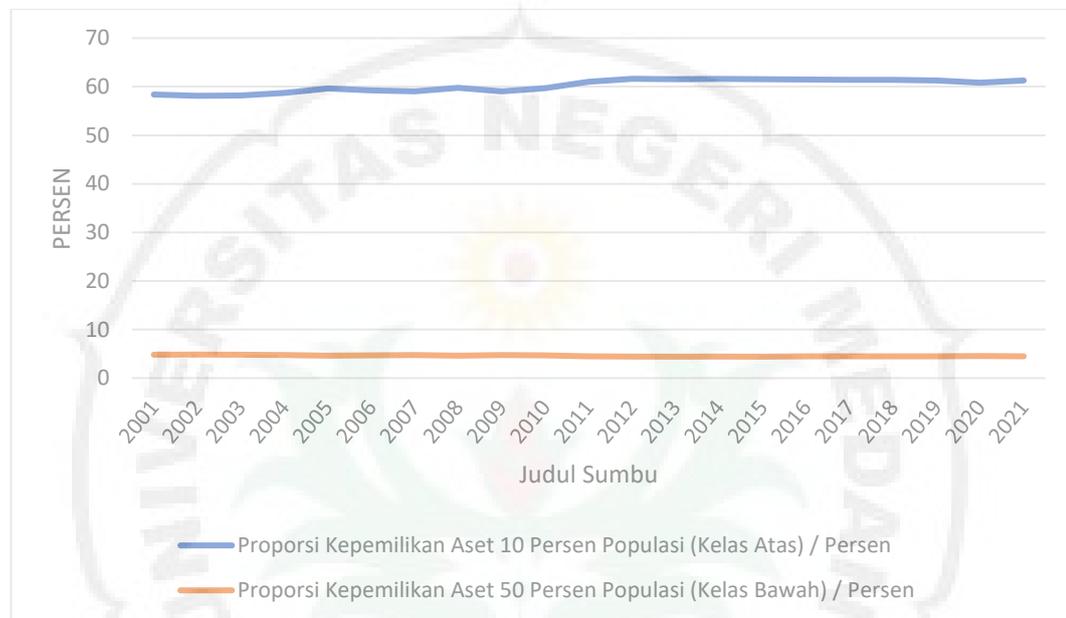
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan merupakan permasalahan klasik ekonomi dari dulu hingga kini yang belum dapat diselesaikan di berbagai negara. Masalah ketimpangan sering dialami oleh negara-negara berkembang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada negara maju juga terdapat ketimpangan. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang masih bergelut dengan masalah ketimpangan. Ketimpangan atau disparitas antar daerah yang terjadi di Indonesia disebabkan karena masing-masing wilayah mempunyai karakteristik kandungan alam yang berbeda dari segi sumber daya alam maupun dari segi demografi. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan kemampuan masing-masing wilayah untuk mendorong proses pembangunan.

Secara umum, ketimpangan dapat diartikan sebagai kondisi-kondisi tertentu yang dimana kondisi ini memunculkan adanya perbedaan yang cukup besar antara satu orang dengan orang lainnya atau bisa juga antara satu kelompok atau golongan dengan kelompok atau golongan lainnya. Menurut Kuncoro (2006) ketimpangan melekat pada standar hidup yang relatif pada semua orang, karena ketimpangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan anugerah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang membuat masyarakat suatu wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dan tingkat pembangunan di berbagai wilayah

dan daerah juga berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).



Sumber : Databoks.katadata.co.id

Gambar 1.1 Proporsi Kepemilikan Aset Kekayaan Populasi Kelas Atas dan Kelas Bawah di Indonesia (2001-2021)

Menurut World Inequality Report 2022 (databoks, 2022) dalam dua dekade terakhir ketimpangan / kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selama periode 2001-2021 tercatat sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (total household wealth). Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode yang sama, seperti terlihat pada grafik di atas.

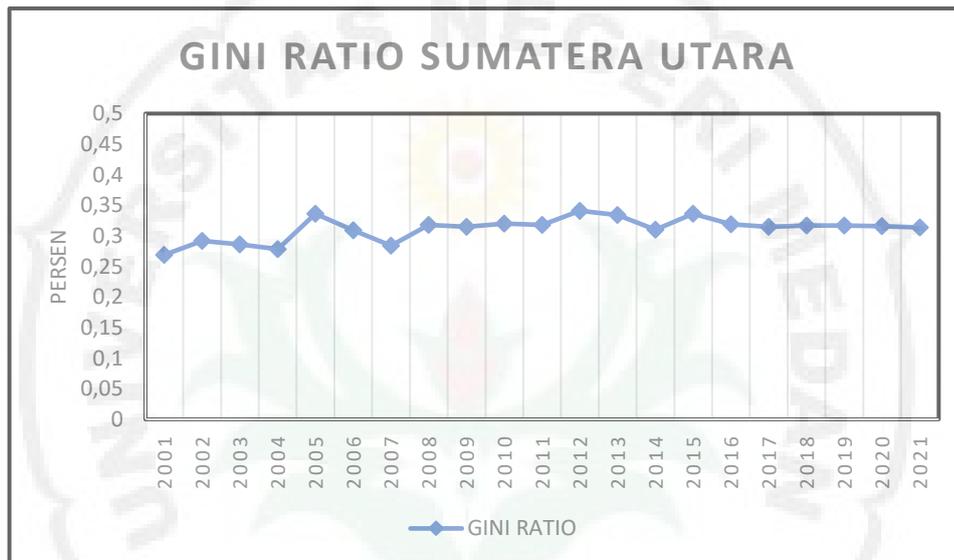
Menurut Todaro dan Smith (dalam Waluyaningsih, 2020) mengemukakan bahwa Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang

maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakatnya

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah adalah dengan melihat koefisien gini (gini ratio). Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika indeks Gini bernilai 0 akan dikatakan adanya pemerataan pendapatan sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama di suatu daerah tersebut sedangkan apabila nilainya 1 maka bisa dikatakan ketidakmerataan pendapatan sempurna di suatu daerah tersebut. Dan apabila nilai yang di peroleh dari perhitungan Indeks Gini mencapai 0,4 maka bisa dikatakan ketimpangan wilayah tersebut termasuk parah.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami masalah ketimpangan pendapatan adalah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana kota Medan sebagai ibukota Provinsi. Sumatera Utara Memiliki luas wilayah sekitar 72.981,23 km² serta jumlah penduduk sebanyak 15.372.437 jiwa Menjadikan Sumatera Utara menjadi salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan populasi yang banyak itu menjadikan Provinsi Sumatera

memiliki potensi perekonomian yang cukup menjanjikan. Namun, meskipun dengan wilayah dan populasi penduduk yang cukup besar hal ini tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan bagi masyarakat Sumatera Utara. Dimana masih terdapat ketimpangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan



rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Adapun hal itu dapat dibuktikan melalui grafik ketimpangan pendapatan sebagai berikut ini.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

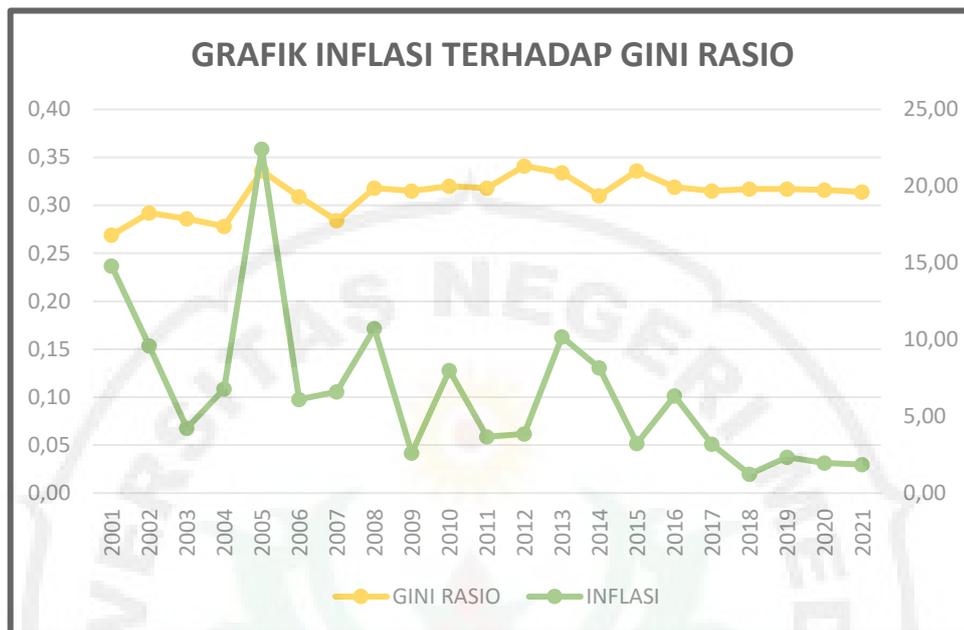
Gambar 1.2 Grafik Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan ketimpangan pendapatan (gini ratio) di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu selama 20 tahun yaitu mulai 2001 hingga 2021. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka gini rasio di Sumatera Utara tertinggi terjadi pada tahun 2012, sebesar 0,341. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar 0,269. Berdasarkan data yang terlampir menurut ukuran indeks gini, maka gini rasio Sumatera Utara termasuk dalam golongan rendah, namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera, dalam kurun waktu 2001-2021 provinsi Sumatera Utara terhitung

3 kali menempati peringkat 3 dari sepuluh provinsi di pulau sumatera, yaitu pada tahun 2002, 2009, dan 2010. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakmerataan pendapatan yang diterima masyarakat provinsi sumatera utara dalam kurun waktu tersebut.

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara, yang diukur melalui indeks ratio gini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Tambunan (2001) Ketimpangan pendapatan dapat didorong oleh beberapa faktor seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiscal terutama tingkat pajak, tidak meratanya distribusi di sektor pendidikan, dan angkatan kerja.

Melihat pendapat ahli di atas yang mengungkapkan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka peneliti memfokuskan dan tertarik untuk mengetahui bagaimana inflasi, kemiskinan, dan pendidikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan maka dapat diamati dengan data.



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

Gambar 1.3 Grafik Inflasi terhadap Gini Rasio Sumatera Utara 2001-2021

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa Ketimpangan pendapatan, inflasi, kemiskinan, dan pendidikan di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Utara ialah pada tahun 2005, yaitu sebesar 22,41. Pada tahun 2005 merupakan awal pemerintahan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM sampai 100%, Hal ini berdampak secara nasional, dan ikut mempengaruhi inflasi di provinsi Sumatera Utara, sebagai akibatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari meningkat tajam, sekaligus semua barang dan jasa yang ada di pasar mengalami kenaikan yang cukup besar. Kemudian, inflasi terendah ialah pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,23 persen. Inflasi Sumatera Utara 2018 jauh dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,13 persen. Inflasi terendah ini juga dikarenakan semua kota yang dijadikan indeks harga konsumen (IHK) di

Sumut pada tahun 2018 mengalami inflasi yang sangat rendah. Sibolga inflasi sebesar 0,10 persen, pematang siantar 0,38 persen, medan 0,12 persen dan padang sidimpuan 0,41 persen. (Bps Sumut,2023).

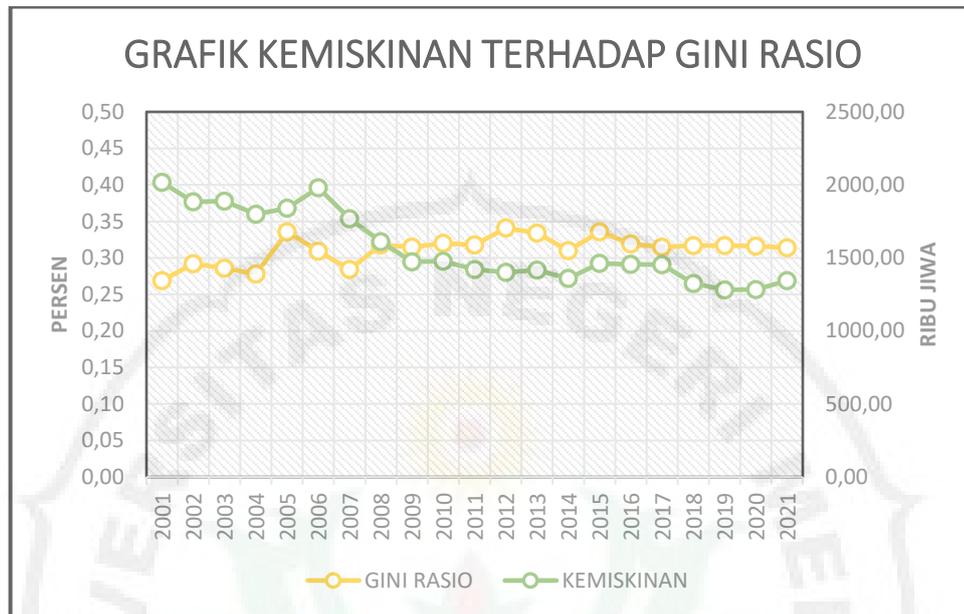
Menurut Sukirno (2004) inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat pada golongan dengan pendapatan/penghasilan tertentu sehingga dengan menurunnya angka permintaan barang dan jasa, maka produsen harus mengurangi pekerja dan dengan pengurangan pekerja ini maka angka pengangguran semakin meningkat sehingga akan menyebabkan kesenjangan pendapatan antar golongan di masyarakat.

Secara teori inflasi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan positif. Artinya inflasi yang tinggi menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi pula. Namun berdasarkan gambar diatas beberapa data menunjukkan inflasi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan negatif. Hal ini ditunjukan dengan data tahun 2002, 2004, 2005, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021. Pada tahun-tahun tersebut hubungan inflasi dengan ketimpangan berbanding terbalik atau bearah negatif.

Fenomena yang muncul terkait inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di sumatera utara dalam jangka pendek, dimana inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi mereka

dengan pendapatan tetap atau rendah, yang akhirnya meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Sedangkan dalam jangka panjang, inflasi dapat menyebabkan kesenjangan gaji antara pekerja dengan pendapatan tetap dan pekerja yang dapat bernegosiasi gaji secara lebih baik, hal ini dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antara berbagai kelompok pekerja. Selain itu, bila inflasi yang tinggi berlangsung lama atau berkelanjutan akan dapat mengurangi nilai rill tabungan, terutama jika tingkat bunga pada simpanan tidak mencukupi untuk mengimbangi inflasi. Ini dapat berdampak lebih besar pada kelompok penghasil rendah dengan tabungan yang rendah pula sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Penelitian yang mengkaji antara inflasi dan ketimpangan pendapatan sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Andriyani (2022) serta Rahman dan Putri (2021) menemukan bukti variabel inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun berbeda dengan temuan Pramesti dan Yasa (2019) serta Rasyidi (2021) yang menemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

Gambar 1.4 Grafik Kemiskinan Terhadap Gini Rasio Sumatera Utara 2001-2021

Selanjutnya, berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin sebagai indikator kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin tertinggi yang ada di provinsi sumatera utara ialah pada tahun 2001, yaitu sebesar 2170,00 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin terendah ialah pada tahun 2019 yaitu sebesar 1282,04 ribu jiwa. Rendahnya angka kemiskinan pada tahun 2019 disebabkan karena inflasi yang terkendali sebesar 3,30 persen serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 5,56 persen pada february 2019 menjadi 5,41 persen pada agustus 2019.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standard hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain (World Bank, 2015). Semakin banyak penduduk miskin akan semakin memperlebar gap / kesenjangan pendapatan antar golongan

masyarakat berpendapatan renda (miskin) dengan yang berpendapatan di atasnya (kaya). Sehingga dapat dikatakan kemiskinan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat suatu daerah/wilayah.

Secara teori kemiskinan memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya peningkatan kemiskinan yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah penduduk miskin akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun berdasarkan gambar diatas terdapat beberapa data yang menunjukkan hubungan negatif antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan data tahun 2002, 2003, 2007, 2009, 2013, 2017, 2019,2020. Pada tahun-tahun tersebut hubungan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan berbanding terbalik atau bearah negatif.

Fenomena yang muncul terkait kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di sumatera utara dalam jangka pendek, adanya ketimpangan dalam kepemilikan aset dan sumber daya dapat memperburuk kemiskinan, yang dimana akan banyak penduduk miskin yang tidak memiliki akses yang memadai ke tanah, properti, atau modal sehingga akan menyulitkan mereka untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik sehingga pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Sedangkan, dalam jangka panjang kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial vertikal, yang berarti kesulitan bagi individu miskin untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, membatasi kesempatan kemajuan bagi keluarga miskin.

Penelitian yang mengkaji antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2021) dan Hindun, dkk (2019) menemukan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berbeda dengan temuan oleh Andiny & Mandasari (2017) menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif / tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pendapatan di provinsi Aceh serta Sudarlan (2015) kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan, hal ini berarti bahwa meningkatnya atau menurunnya jumlah penduduk miskin tidak akan mempengaruhi tingkat ketimpangan



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

Gambar 1.5 Grafik Pendidikan terhadap Gini Rasio Sumatera Utara 2001-2021

Selanjutnya, berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi yang ada di provinsi sumatera utara ialah pada tahun 2021 yaitu di angka 9,58. Hal ini menggambarkan bahwa secara

rata-rata penduduk Sumatera Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai kelas IX atau setara pada kelas 3 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rata-rata lama sekolah terendah ialah pada 2001 dan 2002 dimana pada dua tahun berturut-turut angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara tetap di angka 8,40. Pada tahun 2014 data menunjukkan adanya penurunan dari sebelumnya 9,1 tahun di 2013 yang kemudian turun menjadi 8,9 tahun di 2014.

Secara teori pendidikan hubungan positif atau searah dengan ketimpangan pendapatan. Artinya kenaikan pada indikator-indikator pendidikan akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan gambar diatas, terdapat inkonsistensi hubungan pendidikan dengan ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Utara. Dimana, beberapa tahun terdapat hubungan berlawanan arah. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2002, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 .

Fenomena yang muncul terkait pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara dalam jangka pendek, ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat menyebabkan kelompok masyarakat tertentu terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, menerima pendidikan yang kurang berkualitas. Hal ini dapat membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan ketimpangan pendapatan antar kelompok berbeda tingkatan pendidikan nya. Sedangkan dalam jangka panjang, ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar kelompok sosial dapat menyebabkan kesenjangan atau

ketimpangan pendapatan yang berkelanjutan. Individu atau kelompok yang mendapatkan akses ke pendidikan lebih baik dan berkualitas biasanya memiliki peluang meraih pekerjaan dengan gaji atau pendapatan yang lebih tinggi dibanding yang tingkatan pendidikan dibawahnya, sehingga hal ini nantinya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 tahun 2003). Pendidikan menjadi salah satu faktor mengapa masih ada ketimpangan pendapatan yang ada disuatu daerah/wilayah. Ketika suatu daerah/wilayah masih tergolong rendah tingkat pendidikannya maka tidak mungkin bila ketimpangan pendapatan akan turun bila masih ada ketimpangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian yang mengkaji antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Monika (2016) juga Nadya dan Syafri (2019) menemukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, Hal ini berbeda dengan Nuraini (2017) dan Nabassaga et al. (2020) menemukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Error Correction Model* (ECM) untuk mengetahui pengaruh inflasi, kemiskinan, dan pendidikan terhadap

ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera utara. Model ECM dapat digunakan apabila ditemukan hubungan atau keseimbangan jangka panjang antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam jangka pendek ada kemungkinan akan terjadinya ketidakseimbangan. metode ECM berfungsi untuk mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner dan regresi semu (Junaidi dan Juanda, 2012).

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tentang kondisi ketimpangan pendapatan yang masih ditemukan serta belum adanya pengentasan yang signifikan terhadap permasalahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara maka berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya fluktuasi pada ketimpangan pendapatan tahun 2001-2022
2. Adanya lonjakan inflasi pada tahun 2005 yang diakibatkan oleh kenaikan BBM
3. Adanya tren peningkatan pada jumlah penduduk miskin tahun 2004-2006
4. Adanya tren penurunan pada rata-rata lama sekolah tahun 2004 dan 2014

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka dalam penelitian ini terdapat batasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian dalam penelitian ini ialah Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2021
2. Variabel independen dalam penelitian ini ialah Inflasi, Kemiskinan, Pendidikan
3. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah Ketimpangan Pendapatan
4. Data untuk variabel ketimpangan pendapatan, inflasi, kemiskinan, dan pendidikan ialah gini rasio, indeks harga konsumen, jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah dijadikan penuntun bagi langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, kemiskinan, dan pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil pencapaian yang ingin dicapai atau suatu harapan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian ini tentunya berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan oleh peneliti. Sehingga Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, kemiskinan, dan pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia tentu diharapkan memiliki manfaat bagi dirinya dan lingkungan. Apabila suatu penelitian mampu memberikan kemudahan bagi peneliti lain dan orang lain yang membutuhkannya, maka penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, menjadi bahan referensi pembelajaran serta menjadi rujukan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ketimpangan pendapatan, serta menjadi wadah agar dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada masa perkuliahan. Selain itu, Penelitian ini juga Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Medan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, lalu diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memperluas pandangan terhadap permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah terkait perekonomian maupun bidang-bidang lainnya

c. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan literasi/pustaka bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pengentasan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.